

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
PADA SENGKETA PENGALIHAN FUNGSI LAHAN SAWAH MENJADI
KAWASAN KOMERSIAL DI KABUPATEN BULELENG**

Oleh

Kadek Reza Ayuning Pranindya, NIM 2214101022

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengaturan pengalihan fungsi lahan sawah dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Buleleng, serta untuk mengetahui kendala dan upaya dalam penyelesaian sengketa yang timbul akibat pengalihan fungsi lahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif, yaitu mengkaji keterkaitan antara norma hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan fakta hukum yang terjadi di lapangan (*das sein*). Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumen dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan daerah, serta informasi dari instansi terkait dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Buleleng belum sepenuhnya efektif. Hal ini dipengaruhi oleh kepentingan pembangunan kawasan komersial, faktor ekonomi masyarakat, serta rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan lahan pertanian. Selain itu, dalam penyelesaian sengketa pengalihan fungsi lahan sawah terdapat kendala berupa benturan kepentingan antara kepentingan publik dan kepentingan privat, persepsi masyarakat mengenai hak kepemilikan tanah yang dianggap mutlak, serta tekanan sosial dalam perubahan pemanfaatan lahan. Oleh karena itu, DPRD Kabupaten Buleleng melakukan berbagai upaya, antara lain menampung aduan masyarakat, melakukan peninjauan lapangan, memediasi para pihak yang bersengketa, serta memberikan rekomendasi kebijakan guna mengendalikan pengalihan fungsi lahan agar tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : Alih Fungsi Lahan Sawah, Efektivitas Hukum, Sengketa Lahan, Kabupaten Buleleng

***EFFECTIVENESS OF LAW NUMBER 41 OF 2009 CONCERNING THE
PROTECTION OF SUSTAINABLE FOOD AGRICULTURAL LAND IN
DISPUTES OVER THE CONVERSION OF RICE FIELDS INTO
COMMERCIAL AREAS IN BULELENG REGENCY***

By

Kadek Reza Ayuning Pranindya, NIM 2214101022

Law Study Program

ABSTRACT

*This study aims to analyze the effectiveness of rice field conversion regulations in the context of Law No. 41 of 2009 concerning the Protection of Sustainable Food Agricultural Land in Buleleng Regency, as well as to identify the obstacles and efforts in resolving disputes arising from such land conversion. This study uses an empirical legal research method with a descriptive approach, which examines the relationship between applicable legal norms (*das sollen*) and legal facts in the field (*das sein*). Research data was obtained through interviews, field observations, and document studies using primary and secondary data sources in the form of laws and regulations, regional policy documents, and information from relevant agencies and the community. The results of the study show that the implementation of sustainable agricultural land protection in Buleleng Regency has not been optimal. This is influenced by the interests of commercial area development, community economic factors, and low community understanding and awareness of the importance of agricultural land protection. In addition, in resolving disputes over the conversion of rice fields, there are obstacles in the form of conflicts of interest between public and private interests, the community's perception of land ownership rights as absolute, and social pressure regarding changes in land use. Therefore, the Buleleng Regency DPRD has made various efforts, including accommodating community complaints, conducting field reviews, mediating the disputing parties, and providing policy recommendations to control land use conversion so that it remains in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.*

Keywords : Rice Field Land Use Conversion, Legal Effectiveness, Land Disputes, Buleleng Regency